



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
#GROWSTRONGER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Laporan Keuangan

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Untuk Periode Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2025 (*Audited*)

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan SEACORM KM.2, Desa Budeng, Jembrana, Bali

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jembrana, 1 Mei 2026

Kepala,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jembrana, 30 April 2026

Kepala,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.Si

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp860.460.398,00 atau mencapai 1699,67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp50.625.000.

Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp13.092.177.535,00 atau mencapai 77,06 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.990.026.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset Per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp120.424.171.314,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp359.994.152,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp94.200.991.686,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp25.863.185.476,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp83.826.840,00 dan Rp120.424.171.314,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp68.406.925,00, sedangkan jumlah

beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp19.533.622.234,00 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp19.465.215.309,00. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp57.874.714.821,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp77.339.930.130,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp182.344.282.467,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp77.339.930.130,00, ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp3.104.275.000 dan transaksi antar entitas senilai total Rp12.231.717.137,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp120.340.344.474,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	50.625.000	860.460.398	1.699,67	103.912.754
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	3.115.136.000	3.111.236.849	99,87	2.401.451.668
Belanja Barang	B.4	8.868.159.000	7.657.240.164	86,35	11.079.531.257
Belanja Modal	B.5	5.006.731.000	2.323.700.522	46,41	12.340.182.500
JUMLAH BELANJA		16.990.026.000	13.092.177.535	77,06	25.821.165.425

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN****NERACA****PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024***(Dalam.Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Piutang Bukan Pajak (NETO)	C.2	-	-
Persediaan	C.3	359.994.152	119.255.792
Jumlah Aset Lancar		359.994.152	119.255.792
ASET TETAP			
Tanah	C.4	54.816.312.000	54.816.312.000
Peralatan dan Mesin	C.5	92.102.913.667	85.005.463.732
Gedung dan Bangunan	C.6	26.530.689.330	26.530.689.330
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	12.795.916.887	12.795.916.887
Aset Tetap Lainnya	C.8	154.299.610	154.299.610
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.9	-	7.620.133.183
Akumulasi Penyusutan	C.10	(92.199.139.808)	(93.363.604.461)
Jumlah Aset Tetap		94.200.991.686	93.559.210.281
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.11	30.229.368.077	85.037.405.144
Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	C.12	-	37.132.950
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	-	7.013.620.000
Aset Lain-Lain	C.14	-	4.307.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(4.366.182.601)	(3.006.358.477)
Jumlah Aset Lainnya		25.863.185.476	89.086.106.617
JUMLAH ASET		120.424.171.314	182.764.572.690
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.16	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	62.226.148	420.290.223
Utang yang belum Ditagihkan	C.18	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		62.226.148	420.290.223
JUMLAH KEWAJIBAN		62.226.148	420.290.223
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	120.361.945.166	182.344.282.467
JUMLAH EKUITAS		120.361.945.166	182.344.282.467
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		120.424.171.314	182.764.572.690

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
	D.1		
Pendapatan PNBP Lainnya		68.406.925	44.334.675
Pendapatan Badan Layanan umum		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		68.406.925	44.334.675
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.111.966.706	2.401.451.668
Beban Persediaan	D.3	254.951.932	102.002.986
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.351.680.894	4.853.233.268
Beban Pemeliharaan	D.5	6.442.214.055	1.599.655.460
Beban Perjalanan Dinas	D.6	97.227.974	1.345.976.293
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	6.253.979.981	5.420.083.408
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		19.512.021.542	15.722.403.083
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(19.443.614.617)	(15.678.068.408)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		(57.875.825.121)	(6.549.097.720)
Pendapatan Pelepasan Aset		2.029.000	58.128.764
Beban Pelepasan Aset		57.877.854.121	6.607.226.484
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.110.300	1.449.315
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.110.300	1.449.315
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(57.874.714.821)	(6.547.648.405)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(77.318.329.438)	(22.225.716.813)
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(77.318.329.438)	(22.225.716.813)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	182.344.282.467	178.318.807.428
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(74.151.066.599)	(22.225.716.813)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	3.104.275.000	533.939.181
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.1	-	(2.465.513)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.2	3.104.275.000	536.404.694
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.3	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12.231.717.137	25.717.252.671
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(58.815.074.462)	4.025.475.039
EKUITAS AKHIR		123.529.208.005	182.344.282.467

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Seacorm KM. 2, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan. Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Pemberian dukungan administrasi.

Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki SDM sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 13 orang PNS, 1 orang CPNS, 28 orang PPPK dengan Tingkat Pendidikan dan disiplin ilmu yang beragam. Secara rinci komposisi pegawai Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR		JUMLAH
1	Doktoral	S3	3
2	Master	S2	4
3	Sarjana	S1/D4	18
4	Diploma	D3	1
5	≤Sekolah Menengah Atas	≤SMA	16
JUMLAH			42 orang

PNS Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 14 orang dipetakan berdasarkan jabatan masing-masing, yang terbagi menjadi Pejabat Struktural 2 orang, Pejabat Fungsional 10 orang dan pelaksana 2 orang. Sedangkan komposisi PPPK terdiri dari 5 orang menduduki jabatan fungsional dan 23 orang menduduki jabatan pelaksana umum.

Kegiatan Perjalinan Kerjasama Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sampai dengan 31 Desember 2025 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki 2 Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 1 lagi sedang dalam proses

penandatanganan, antara lain:

1. PKS antara Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan FPIK Universitas Brawijaya tentang berbagi pakai data/atau informasi dalam rangka Pembangunan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan
2. Kerjasama dengan Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang saat ini masih dalam proses penandatanganan perjanjian kerjasama.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan MonSAKTI. Sistem SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan Tingkat satker mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada satker telah sepenuhnya menggunakan SAKTI kelompok Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta modul GLP).

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana diakui diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
 - Pendapatan Pengujian Laboratorium diakui pada saat timbulnya ha katas pendapatan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai

nominal.

- Piutang Jangka Pendek diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antarpemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian

Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KM.6/2023 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan antisipasi terhadap perubahan kondisi prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Pada tahun 2025 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah dilakukan pengajuan revisi sebanyak 13 kali yaitu:

1. Revisi KPA terkait revisi pemuktahiran data petunjuk operasional kegiatan tanggal 7 Februari 2025;
2. Revisi POK pada tanggal 17 Februari 2025 merupakan revisi Pembintangan anggaran dalam halaman IV.A DIPA;
3. Revisi KPA pada tanggal 27 Februari 2025 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;

4. Revisi POK pada tanggal 24 Maret 2025 merupakan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi. Pembintangan anggaran dalam halaman IV.A DIPA;
5. Revisi DJA pada tanggal 25 Maret 2025 merupakan revisi Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
6. Revisi KPA pada tanggal 21 April 2025 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
7. Revisi POK pada tanggal 14 Juli 2025 berupa Pemutahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan. Mekanisme revisi melalui penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 RO dan perubahan Rencana Penarikan Dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
8. Revisi anggaran pada tanggal 9 September 2025 dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi. Revisi dilaksanakan melalui rekomposisi Blokir Anggaran Kode A antara Pusat Data dan Informasi dengan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
9. Revisi administrasi pada tanggal 26 September 2025 berupa Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan melalui mekanisme penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO;
10. Revisi administrasi pada tanggal 23 Oktober 2025 berupa Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan melalui mekanisme penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO;
11. Revisi DJA pada 13 November 2025 dalam rangka buka blokir hasil efisiensi anggaran belanja engan sumber RM;
12. Revisi administrasi pada tanggal 1 Desember 2025 berupa Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan melalui mekanisme penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO;

13. Revisi administrasi pada tanggal 8 Desember 2025 berupa Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan melalui mekanisme penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	50.625.000	50.625.000
Jumlah Pendapatan	50.625.000	50.625.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.600.000.000	3.115.136.000
Belanja Barang	12.806.014.000	8.868.159.000
Belanja Modal	7.369.004.000	5.006.731.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	22.775.018.000	16.990.026.000

Dari total anggaran tersebut terdapat pembintangan/pemblokiran anggaran sehingga anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp.3.836.360.000,00. Terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp1.154.029.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp2.682.331.000,00. Sehingga pagu efektif BPISDKP sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp13.153.666.000,00.

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp860.460.398*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp860.460.398,00 atau mencapai 1699,67 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp50.625.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	2.029.000	0,00
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	-	4.080.915	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	13.600.000	14.719.010	108,23
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	34.475.000	49.607.000	143,89
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan , dan Pengembangan	1.800.000	-	0,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	750.000	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu		1.110.300	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu		788.914.173	0,00
Jumlah	50.625.000	860.460.398	1699,67%

Realisasi Pendapatan tahun 2025 Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berasal dari :

1. Pendapatan dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.029.000,00 berasal dari penjualan/Lelang aset berupa peralatan server;
2. Pendapatan sewa tanah, Gedung dan Bangunan Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.080.915,00 berasal dari sewa rumah dinas PNS Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 12 orang yang dipotong dengan mekanisme potongan SPM gaji induk;
3. Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp14.719.010,00 berasal dari sewa rumah negara yang dipotong dengan mekanisme potongan SPM gaji induk dan sewa mess Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi mahasiswa yang sedang melakukan PKL/magang.
4. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp49.607.000,00 berasal dari pengujian kualitas air laboratorium kualitas perairan BPISDKP;
5. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.110.300 berasal dari kekurangan gaji PNS mulai bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 yang telah dibayarkan pada bulan Februari 2025 dengan nomor SPM 00049T/632004/2025 dan nomor SP2D 251321303000043 tanggal 19 Februari 2025.
6. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp788.914.173 berasal dari penihilan belanja modal tahun 2024 yang dibayarkan melalui mekanisme RPATA.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode Per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 803,42%. Hal ini disebabkan pada tahun 2025, terdapat pendapatan dari penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran tahun 2024 yang dibayarkan melalui mekanisme RPATA. Pengajuan RPATA sebesar Rp3.104.009.009 terdiri dari pekerjaan Pengadaan Citra Satelit Radar dan Penggantian Sistem Radar Terminal. Dari anggaran tersebut terdapat pengembalian belanja pada saat penihilan RPATA sebesar Rp788.914.173. Secara rinci penjelasan terkait pengadaan pekerjaan ada di bab Pengungkapan Lainnya.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-7/PB/PB.6/2025 perihal Penyampaian Pemutakhiran Akun Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Dinas/Negara, maka dilakukan ralat SPM tanggal 17 Juli 2025 nomor 0001T, 0002T, 0003T dan 0004T untuk menyesuaikan penerimaan berupa sewa rumah dinas bagi pegawai. Semula penerimaan dicatat pada akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan menjadi 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi. Perubahan tersebut tercatat mulai bulan Juli.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan tanah, gedung dan Bangunan	-	5.668.000	(5.668.000)	#DIV/0!
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin	2.029.000	52.460.764	(50.431.764)	(2485,55)
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	4.080.915	7.732.675	(3.651.760)	(89,48)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	14.719.010	-	14.719.010	100,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Penerimaan Kembali	49.607.000	33.602.000	16.005.000	32,26
Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	1.110.300	-	1.110.300	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran	-	1.449.315	(1.449.315)	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	788.914.173	-	788.914.173	100,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	-	3.000.000	(3.000.000)	#DIV/0!
Jumlah	860.460.398	95.244.754	765.215.644	803,42

B.2. BELANJA

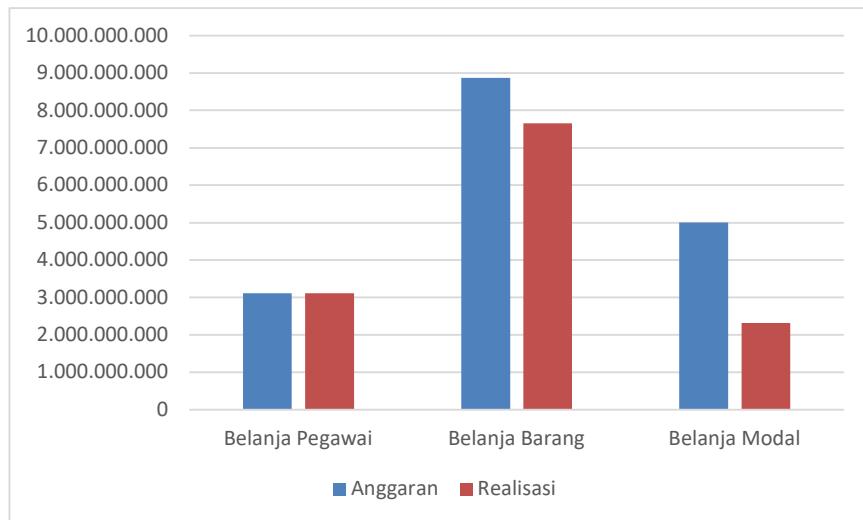
Realisasi Belanja
Rp13.092.177.535
5

Realisasi Belanja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 adalah sebesar Rp13.092.177.535,00 atau 77,06% dari anggaran belanja sebesar Rp16.990.026.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.115.136.000	3.112.167.099	99,90
Belanja Barang	8.868.159.000	7.657.720.164	86,35
Belanja Modal	5.006.731.000	2.323.700.522	46,41
Total Belanja Kotor	16.990.026.000	13.093.587.785	77,07
Pengembalian Belanja	-	(1.410.250)	
Total Belanja	16.990.026.000	13.092.177.535	77,06

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 49,30 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya pemblokiran pada beberapa kegiatan yang menggunakan belanja barang dan belanja modal. Secara rinci penurunan realisasi belanja terjadi Belanja Barang dan Belanja Modal. Kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, menyebabkan terjadinya pemblokiran anggaran belanja barang dan belanja modal di BPISDKP.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024, penurunan realisasi belanja barang dan belanja modal TA.2025 masing-masing sebesar 30,89 persen dan 81,17 persen.

Kenaikan terjadi pada realisasi belanja pegawai sebesar 29,56%. Kenaikan realisasi belanja pegawai disebabkan

terdapat penambahan jumlah pegawai BPISDKP dengan status CPNS sebanyak 1 orang atas nama Reza Muzhaffar Fauzan selain itu per 1 Oktober 2025 BPISDKP mendapatkan pegawai PPPK sebanyak 25 orang.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.111.236.849	2.401.451.668	709.785.181	29,56%
Belanja Barang	7.657.240.164	11.079.531.257	(3.422.291.093)	-30,89%
Belanja Modal	2.323.700.522	12.340.182.500	(10.016.481.978)	-81,17%
Jumlah	13.092.177.535	25.821.165.425	(12.728.987.890)	-49,30%

*Belanja Pegawai
Rp3.111.236.849*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.111.236.849,00 dan Rp2.401.451.668,00. Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 29,26% dari TA 2024. Hal ini disebabkan terdapat penambahan jumlah pegawai BPISDKP dengan status CPNS sebanyak 1 orang atas nama Reza Muzhaffar Fauzan. Selain itu per 1 Oktober 2025 BPISDKP mendapatkan pegawai PPPK sebanyak 25 orang.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	694.500.420	712.650.600	(18.150.180)	-2,55%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.305	10.611	(1.306)	-12,31%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	52.939.370	49.302.940	3.636.430	7,38%
Belanja Tunj. Anak PNS	20.275.176	19.721.176	554.000	2,81%
Belanja Tunj. Struktural PNS	22.140.000	24.120.000	(1.980.000)	-8%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	106.920.000	48.978.000	57.942.000	118,30%
Belanja Tunj. PPh PNS	6.887.302	5.107.072	1.780.230	34,86%
Belanja Tunj. Beras PNS	40.917.300	40.989.720	(72.420)	-0,18%
Belanja Uang Makan PNS	105.981.000	91.369.000	14.612.000	15,99%
Belanja Tunjangan Umum PNS	8.580.000	16.905.000	(8.325.000)	-49,25%
Belanja Gaji Pokok PPPK	339.149.400	121.736.800	217.412.600	179%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.891	2.477	3.414	137,83%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	20.420.290	3.844.320	16.575.970	431,18%
Belanja Tunjangan Anak PPPK	6.385.948	1.537.728	4.848.220	315,28%
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	27.000.000	14.040.000	12.960.000	92,31%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	22.160.520	5.359.080	16.801.440	313,51%
Belanja Uang Makan PPPK	81.407.000	18.500.000	62.907.000	340,04%
Belanja Tunjangan Umum PPPK	12.495.000	0	12.495.000	#DIV/0!
Belanja Uang Lembur	17.124.000	14.059.000	3.065.000	21,80%
Belanja Uang Lembur PPPK	21.041.000	979.000	20.062.000	2049,23%
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	1.053.355.073	1.042.963.942	10.391.131	1,00%
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	452.473.104	169.645.396	282.827.708	166,72%
Jumlah Belanja Kotor	3.112.167.099	2.401.821.862	710.345.237	29,58%
Pengembalian Belanja Pegawai	(930.250)	(370.194)	(560.056)	151,29%
Jumlah Belanja	3.111.236.849	2.401.451.668	709.785.181	29,56%

Belanja Barang
Rp7.657.240.164

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan TA 2024

adalah masing-masing sebesar Rp7.657.240.164,00 dan Rp11.079.531.257,00. Realisasi belanja barang Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan sebesar 30,89% dari realisasi tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.727.010.337	1.851.888.634	(124.878.297)	-6,74%
Belanja Barang Non Operasional	12.320.741	178.287.081	(165.966.340)	-93,09%
Belanja Barang Persediaan	667.433.292	14.130.1552	526.131.740	372,35%
Belanja Jasa	1.758.133.765	2.870.033.463	(1.111.899.698)	-38,74%
Belanja Pemeliharaan	3.395.594.055	4.693.087.801	(1.297.493.746)	-27,65%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	97.227.974	1.345.976.293	(1.248.748.319)	-92,78%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-	# DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	7.657.720.164	11.080.574.824	(3.422.854.660)	-30,89%
Pengembalian Belanja	(480.000)	(1043.567)		
Jumlah Belanja	7.657.240.164	11.079.531.257	-3.422.854.660	(30,89)

*Belanja Modal
Rp2.323.700.522*

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.323.700.522,00 dan Rp12.340.182.500,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Per 31 Desember 2025 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan sebesar 81,17% dibandingkan TA 2024. Disebabkan oleh adanya kebijakan blokir pada komponen belanja modal terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, hanya sebagian anggaran belanja modal yang bisa direalisasikan pada TA. 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	11.597.523.500	-11.597.523.500	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	2.323.700.522	742.659.000	1.581.041.522	68,04
Jumlah Belanja Kotor	2.323.700.522	12.340.182.500	-10.016.481.978	(431,06)
Pengembalian	-	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	2.323.700.522	12.340.182.500	-10.016.481.978	-81,17

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran terkait dengan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	11597.523.500	-11597.523.500	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	11.597.523.500	-11.597.523.500	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	11.597.523.500	-11.597.523.500	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.323.700.522,00 dan Rp742.659.000,00. Belanja modal lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Data Citra Satelit Radar COSMOS SkyMED.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan pada tahun 2024 sebesar Rp0.

Piutang Bukan
Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0. dan Rp0.

Persediaan
Rp359.994.152

C.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp359.994.152,00 dan Rp119.255.792,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Persediaan	TH 2025	TH 2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Barang Konsumsi	34.249.950	43.690.402	(9.440.452)	-21,61%
Bahan Baku	8.847.500	75.565.390	(66.717.890)	-88,29%
Suku cadang	316.896.702	-	316.896.702	#DIV/0!
Jumlah	359.994.152	119.255.792	240.738.360	201,87%

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada

dalam kondisi baik.

Tanah

Rp54.816.312.000

C.4 Tanah

Tanah yang dimiliki Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp54.816.312.000,00 dan Rp Rp54.816.312.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025		Rp 54.816.312.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2025		Rp 54.816.312.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025		Rp 54.816.312.000

Peralatan dan
Mesin

Rp92.102.913.667
,00

C.5 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp92.102.913.667,00 dan Rp85.005.463.732,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	85.005.463.732
<i>Mutasi tambah:</i>	Rp	24.971.249.238
Pembelian		
Reklasifikasi Masuk	Rp	75.841.800
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	9.729.947.027
Koreksi Susulan	Rp	3.047.100.000
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	2.039.474.625
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	171.743.000
Perolehan Lainnya	Rp	9.907.142.786
<i>Mutasi kurang:</i>	Rp	17.873.799.303
Reklasifikasi Keluar	Rp	75.841.800
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	8.097.245.867
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	9.700.711.636
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	92.102.913.667
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	80.770.376.488
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	11.332.537.179

Mutasi tambah:

1. Pencatatan atas pembelian Gergaji Merk Ramses 5800 dengan nilai perolehan Rp1.015.000 akun Belanja barang operasional lainnya (521119) berdasarkan surat keterangan pencatatan perolehan lainnya nomor B.917/BPISDKP/PL.760/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
2. Reklasifikasi Masuk Alat Kantor & Rumah Tangga merupakan pencatatan atas perbaikan kodefikasi aset karena kurangnya pengetahuan operator aset pada itu BMN yang dimaksud dicatat sebagai alat persenjataan menurut kategori kelompok barang di aplikasi berdasarkan surat keterangan koreksi pencatatan nomor B.1430/BPISDKP/PL.760/IX/2025 tanggal 30 September 2025 sejumlah 2 unit dengan nilai sebesar Rp2.168.100;
3. Perolehan Lainnya Alat Kantor & Rumah Tangga merupakan pencatatan atas belanja barang operasional

lainnya (521119) berdasarkan surat keterangan pencatatan perolehan lainnya nomor B.1086/BPISDKP/PL.760/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 sejumlah 28 unit senilai Rp149.256.150;

4. Pembelian Alat Kantor & Rumah Tangga berupa 5 unit Mesin Pemotong Rumput dan 10 unit Water Dispenser dengan nilai perolehan sebesar Rp56.160.000 berdasarkan surat keterangan pencatatan perolehan lainnya nomor B.917/BPISDKP/PL.760/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
5. Reklasifikasi Masuk dari persediaan berupa Pembelian Alat Kantor & Rumah Tangga merupakan pencatatan atas belanja pembelian Mesin absen merk Solution X305 dengan akun belanja persediaan (521811) Penyediaan pendukung pengolah Data Geospasial dengan Nomor Nota Penjualan Toko Mitra Mandiri Computer 25110255 tanggal 14 November 2025 senilai total Rp30.430.000 dengan produk berupa mesin absen merk Solution X305 sebanyak 10 unit. Pembelian mesin absen tersebut dicatat sebagai persediaan pada modul persediaan dengan kode barang 1010310999 Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya. Barang tersebut seharusnya masuk ke dalam aset dengan kode barang 3050105017 berupa Mesin Absensi;
6. Reklasifikasi masuk pada alat studio, komunikasi dan pemancar berupa pencatatan atas perbaikan kodefikasi aset karena kurangnya pengetahuan operator aset pada itu BMN yang dimaksud dicatat sebagai alat persenjataan menurut kategori kelompok barang di aplikasi berdasarkan surat keterangan koreksi pencatatan nomor B.1430/BPISDKP/PL.760/IX/2025 tanggal 30 September 2025 sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp28.860.000;
7. Reklasifikasi masuk pada Alat Laboratorium berupa pencatatan atas Perbaikan kodefikasi aset karena

kurangnya pengetahuan operator aset pada itu BMN yang dimaksud dicatat sebagai alat persenjataan menurut kategori kelompok barang di aplikasi berdasarkan surat keterangan koreksi pencatatan nomor B.1430/BPISDKP/PL.760/IX/2025 tanggal 30 September 2025 sejumlah 3 nit dengan nilai sebesar Rp44.813.700;

8. Reklasifikasi masuk dari persediaan pada Alat Laboratorium merupakan Pencatatan atas pembelian UPS dengan akun belanja persediaan (521811) Penyediaan pendukung pengolah Data Geospasial dengan BAST Inaproc (Katalog Elektronik) nomor BAST.022/PPK/BPISDKP/XI/2025 tanggal 14 November 2025 senilai total Rp131.313.000 dengan produk UPS kapasitas 2200VA dan 1600VA sejumlah 21 unit. Pembelian UPS tersebut dicatat sebagai persediaan pada modul persediaan dengan kode barang 1010306999 Alat Listrik Lainnya. Barang tersebut seharusnya masuk ke dalam aset dengan kode barang 308014125 berupa Stabilizer/UPS;
9. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP merupakan pencatatan atas Pekerjaan Penggantian Sarana Sistem Radar Terminal dengan menggunakan Akun 532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin) dicatat sebagai perolehan KDP 7010101002 dengan No KDP 2 sebagai Aset Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan dengan nilai Rp 9.729.947.027 berdasarkan Berita acara serah terima nomor 001/BAST/PPK.1/PL.410/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, Surat Keterangan Koreksi Pencatatan nomor B.659/BPISDKP/PL.760/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 dikapitalisasi menjadi aset tetap Rak Server dengan kode aset 3100204001 NUP. 16 dengan nilai perolehan Rp9.729.947.027;
10. Perolehan Lainnya merupakan pencatatan atas

Pekerjaan Penggantian Sarana Sistem Radar Terminal dengan menggunakan Akun 532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin) dikapitalisasi menjadi aset tetap Rak Server dengan kode aset 3100204001 NUP. 16 dengan nilai perolehan Rp9.729.947.027 yang kemudian dilakukan koreksi nilai berkurang senilai Rp9.700.711.636. Dari hasil koreksi nilai berkurang ini dicatat menjadi beberapa jenis barang yaitu Server, External/portable Harddisk, Switch Rack, Firewall dan Server;

11. Koreksi Susulan berupa transaksi Penambahan Nilai yang diperoleh berdasarkan kontrak nomor 001/SP.BPISDKP/PPK1/VII/2024 E-Geos SPA tanggal 2 Juli 2024 dan Berita Acara Serah terima nomor 001/BAST/PPK.1/PL.410/I/2025 tanggal 31 Januari 2025. Berdasarkan BAST tersebut, terdapat pekerjaan professional servis meliputi On-Site Setup, On Site Acceptance Test serta pelatihan teknis On-Site dan Operasional system yang menggunakan akun belanja 523121 (belanja pemeliharaan peralatan dan mesin) senilai Rp3.047.100.000;
12. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif diperoleh melalui transaksi penggunaan kembali kode barang 3100204001 (server) NUP 20,25,27,29 dan 30 dengan nilai Transaksi Rp2.039.474.625. Hal tersebut terjadi karena pada saat mengajukan usulan penghapusan BMN berupa peralatan dan mesin dengan pemusnahan dengan nomor B.875/BPISDP/PL.750/VI/2025 Tanggal 19 Juni 2025 terjadi kesalahan penginputan barang yang akan dihapuskan yaitu kode barang server sebanyak 5 NUP yaitu NUP 20,25,27,29 dan 30;
13. Pencatatan atas pembelian UPS dengan akun belanja persediaan (521811) Penyediaan pendukung pengolah Data Geospasial dengan BAST Inaproc (Katalog

Eletronik) nomor BAST.022/PPK/BPISDKP/XI/2025 tanggal 14 November 2025 senilai total Rp131.313.000 dengan produk UPS kapasitas 2200VA dan 1600VA sejumlah 21 unit. Pembelian UPS tersebut dicatat sebagai persediaan pada modul persediaan dengan kode barang 1010306999 Alat Listrik Lainnya. Barang tersebut seharusnya masuk ke dalam aset dengan kode barang 308014125 berupa Stabilizer/UPS;

14. Mutasi Tambah berupa Pembelian Alat Kantor & Rumah Tangga merupakan pencatatan atas belanja pembelian printer Canon Maxify GX 7070 dengan akun belanja persediaan (521811) Penyediaan pendukung pengolah Data Geospasial dengan nota penjualan PT. Eterno System Indonesia nomor INV-251209-0003 tanggal 9 Desember 2025 senilai Rp10.000.000,- dengan produk berupa Printer Canon Maxify GX 7070 sebanyak 1 unit. Pembelian printer tersebut dicatat sebagai persediaan pada modul persediaan dengan kode barang 1010310999 Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya. Barang tersebut seharusnya masuk ke dalam aset dengan kode barang 3100203003 berupa printer;

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin :

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang merupakan pencatatan atas Pekerjaan Penggantian Sarana Sistem Radar Terminal dengan menggunakan Akun 532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin) dikapitalisasi menjadi aset tetap Rak Server dengan kode aset 3100204001 NUP. 16 dengan nilai perolehan Rp9.729.947.027 yang kemudian dilakukan koreksi nilai berkurang senilai Rp9.700.711.636,00;
2. Penghentian Aset Dari Penggunaan, berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.839/BPISDKP/PL.760/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 dan nomor B.831/BPISDKP/PL.760/VI/2025 tanggal

16 Juni 2025 dilakukan pencatatan atas BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional karena kondisi rusak berat sejumlah 28 Unit senilai Rp8.097.245.867,00 berupa server dan eksternal hardisk;

3. Reklasifikasi keluar pada Alat Persenjataan merupakan pencatatan atas perbaikan kodefikasi aset karena kurangnya pengetahuan operator aset pada itu BMN yang dimaksud dicatat sebagai alat persenjataan menurut kategori kelompok barang di aplikasi berdasarkan surat keterangan koreksi pencatatan nomor B.1430/BPISDKP/PL.760/IX/2025 tanggal 30 September 2025 sejumlah 6 unit dengan nilai sebesar Rp75.841.800,00.

*Gedung dan
Bangunan
Rp26.530.689.330
,00*

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan TA 2025 dan 2024 adalah Rp26.530.689.330,00 dan Rp26.530.689.330,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	26.530.689.330
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2025	26.530.689.330
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	4.469.229.420
Nilai Buku per 31 Desember 2025	30.999.918.750

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp12.795.916.887
,00*

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.795.916.887,00 dan Rp12.795.916.887,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	12.795.916.887
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	12.795.916.887
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	6.889.854.310
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.906.062.577

*Aset Tetap Lainnya
Rp154.299.610,00*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah Rp154.299.610 dan Rp154.299.610.

Saldo per 31 Desember 2024	154.299.610
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	154.299.610
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	154.299.610

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp7.620.133.183,00.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp92.199.139.808*

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp92.199.139.808,00 dan Rp93.363.604.461,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Tak Berwujud
Rp30.229.368.077*

C.11 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) TA 2025 dan 2024 adalah Rp30.229.368.077,00 dan Rp85.037.405.144,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Tak
Berwujud dalam
Pengerjaan Rp0*

C.12 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan TA 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp37.132.950,00.

*Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp0*

C.13 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya pada TA 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp7.013.620.000,00.

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.14 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain TA 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp4.307.000,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp4.366.182.601*

C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.366.182.601,00 dan Rp3.006.358.477,00.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.16 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau

Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp83.826.840

C.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp83.826.840,00 dan Rp420.290.223,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak ketiga Balai Pengelolaan dan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, berupa pembayaran kekurangan Gaji Induk PNS untuk bulan November dan Desember 2025 sebesar Rp729.857,00;
2. Belanja barang, berupa pembayaran Langganan listrik, langganan air, dan Langganan Telepon bulan Desember 2025;
3. Belanja Pegawai berupa Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp21.600.692,00

Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025

No	Tanggal SPM	Uraian	Belanja	Nilai
1		pembayaran kekurangan Gaji Induk PNS untuk bulan November dan Desember 2025	51	729.857
2		pembayaran Langganan listrik, langganan air, dan Langganan Telepon bulan Desember 2025	52	61496.291
		Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja pegawai bulan Agustus s.d Desember 2025	51	21600.692
		JUM LAH		83.826.840

Utang yang Belum Ditagihkan Rp0

C.18 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan pada TA.2025 adalah sebesar

Rp0 sedangkan pada TA.2024 sebesar Rp0.

Ekuitas
Rp120.340.344.47
4

C.19 Ekuitas

Ekuitas TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp120.340.344.474,00 dan Rp182.344.282.467,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp68.406.925

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp68.406.925,00 dan Rp44.334.675,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	4.080.915	7.732.675	(47,23)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	14.719.010	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Jumlah Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	18.799.925	7.732.675	143,12
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum			
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	49.607.000	33.602.000	47,63
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	-	-	-
Jumlah Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	49.607.000	33.602.000	47,63
Pendapatan Jasa Lainnya			
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	-	3.000.000	(100,00)
Jumlah Pendapatan Jasa Lainnya	-	3.000.000	(100,00)
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	68.406.925	44.334.675	54,30
Jumlah	68.406.925	44.334.675	54,30

1. Pendapatan sewa tanah, Gedung dan Bangunan Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.080.915,00 berasal dari sewa rumah dinas PNS Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 7 orang yang dipotong dengan mekanisme potongan SPM gaji induk;
2. Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp14.719.010,00 berasal dari sewa rumah negara yang dipotong dengan mekanisme potongan SPM gaji induk dan sewa mess Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi mahasiswa yang sedang melakukan PKL/magang.
3. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan

standardisasi lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp49.607.000,00 berasal dari pengujian kualitas air laboratorium kualitas perairan BPISDKP;

4. Persentase kenaikan realisasi terbesar pada pendapatan dari penjualan, pengelolaan BUMN, Iuran badan Usaha, selanjutnya adalah Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, kalibrasi dan Standardisasi lainnya;
5. Persentase penurunan sebesar 100% pada Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan dan Informasi, karena terjadi perubahan tugas dan fungsi BPISDKP sehingga kegiatan yang menunjang pendapatan di atas tidak di laksanakan pada tahun 2025.

*Beban Pegawai
Rp3.133.567.398*

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.133.567.398,00 dan Rp2.401.451.668,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	695.139.420	712.650.600	(17.511.180)	(2,52)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(250)	(194)	(56)	22,40
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.305	10.611	(1.306)	(14,04)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	53.003.270	49.302.940	3.700.330	6,98
Beban Tunj. Anak PNS	20.300.736	19.721.176	579.560	2,85
Beban Tunj. Struktural PNS	22.140.000	24.120.000	(1.980.000)	(8,94)
Beban Tunj. Fungsional PNS	106.920.000	48.978.000	57.942.000	54,19
Beban Tunj. PPh PNS	6.888.509	5.107.072	1.781.437	25,86
Beban Tunj. Beras PNS	40.917.300	40.989.720	(72.420)	(0,18)
Beban Uang Makan PNS	105.981.000	91.369.000	14.612.000	13,79
Beban Tunjangan Umum PNS	8.580.000	16.905.000	(8.325.000)	(97,03)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(930.000)	(370.000)	(560.000)	60,22
Beban Gaji Pokok PPPK	339.149.400	121.736.800	217.412.600	64,11
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.081	2.477	3.604	59,27
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	20.420.290	3.844.320	16.575.970	81,17
Beban Tunjangan Anak PPPK	6.385.948	1.537.728	4.848.220	75,92
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	27.000.000	14.040.000	12.960.000	48,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	22.160.520	5.359.080		
Beban Uang Makan PPPK	81.407.000	18.500.000	62.907.000	77,27
Beban Tunjangan Umum PPPK	12.495.000		12.495.000	100,00
Beban Uang Lembur	17.124.000	14.059.000	3.065.000	17,90
Beban Uang Lembur PPPK	210.410.000	979.000	20.062.000	95,35
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.074.955.765	1.042.963.942	400.494.759	37,26
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	452.473.104	169.645.396	818.500.698	180,89
JUMLAH	3.133.567.398	2.401.451.668	732.115.730	30,49

Belanja Pegawai mengalami kenaikan karena ada penambahan 1 orang PNS per 1 Juli 2025 dan 25 orang PPPK per 1 Oktober 2025.

*Beban Persediaan
Rp254.951.932*

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp254.951.932,00 dan Rp102.002.986,00

dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

Persediaan	TH 2025	TH 2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Barang Konsumsi	95.978.152	32.727.116	63.251.036	193,27%
Bahan Baku	158.973.780	69.275.870	89.697.910	129,48%
Jumlah	254.951.932	102.002.986	152.948.946	149,95%

Beban persediaan konsumsi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TA 2025 sebesar Rp95.978.152,00 berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dan komputer supply, sedangkan beban persediaan bahan baku Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp158.973.780,00 berupa bahan penunjang laboratorium dan bahan kimia laboratorium.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp3.351.680.894*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.351.680.894,00 dan Rp4.853.233.268,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1365.307.257	1520.701415	-155.394.158	-10%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.097.500	21095.500	-18.998.000	-90%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	632.800	49.700	583.100	1173%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	83.280.000	86.766.000	-3.486.000	-4%
Beban Barang Operasional Lainnya	126.436.630	118.276.019	8.160.611	7%
Beban Bahan		3.600.000	-3.600.000	-100%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	12.320.741	174.687.081	-162.366.340	-93%
Beban Langganan Listrik	585.620.519	797.792.115	-212.171596	-27%
Beban Langganan Telepon	16.057.546	10.663.809	5.393.737	51%
Beban Langganan Air	117.571000	125.128.000	-7.557.000	-6%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	695.921493	1033.370.913	-337.449.420	-33%
Beban Jasa Konsultan		64.269.000	-64.269.000	-100%
Beban Sewa	69.462.000	218.760.000	-149.298.000	-68%
Beban Jasa Profesi	400.000	9.500.000	-9.100.000	-96%
Beban Jasa Lainnya	276.573.408	668.573.716	-392.000.308	-59%
JUMLAH	3.351.680.894	4.853.233.268		

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp6.442.214.055,

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.442.214.055,00 dan Rp1.559.655.460,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218.519.700,	650.606.830,	-432.087.130	-1,98
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6.883.000,	88.037.659,	-81.154.659	-11,79
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.172.541.755,	693.078.871,	5.479.462.884	89%
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-480.000,		-480.000	1,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.969.000,	20.163.000,	-10.194.000	-1,02
Beban Pemeliharaan Irigasi		18.924.000,	-18.924.000	#DIV/0
Beban Pemeliharaan Jaringan	34.780.600,	128.845.100,		
Jumlah	6.442.214.055	1.599.655.460		

*Beban Perjalanan Dinas
Rp97.227.974*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp97.227.974,00 dan Rp1.345.976.293,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	97.227.974	1325.256.293	-1228.028.319	-93%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Lua Kota	0	20.720.000	-20.720.000	-100%
Jumlah	97.227.974	1.345.976.293	-1.248.748.319	

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp6.253.979.981

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.253.979.981,00 dan Rp5.420.083.408,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Kegiatan Non Operasional
Rp(57.874.714.821)
1)

D.11. Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp57.874.714.821,00 dan Rp6.547.648.405,00.

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12. POS LUAR BIASA

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp182.344.282.467
7

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp182.344.282.467,00 dan Rp178.318.807.428,00.

Defisit LO
Rp77.339.930.130

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar Rp77.339.930.130,00 dan Rp22.225.716.813,00.

Koreksi atas Reklasifikasi
Rp0

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.465.513,00.

*Koreksi Aset Non
Revaluasi
Rp3.104.275.000*

E.3.2 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.104.275.000,00 dan Rp536.404.694,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp12.231.717.137*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.231.717.137,00 dan Rp25.717.252.671,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode TA 2025, DDEL sebesar Rp860.460.398,00 sedangkan DKEL sebesar Rp13.092.177.535,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung TA 2025 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TA 2025 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp120.340.344.47
4

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp120.340.344.474,00 dan Rp182.344.282.467,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TAHUN 2025

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdapat pada fungsi Ekonomi dengan rincian sebagaimana terlampir (Lampiran 1). Terdapat satu RO yang tidak terealisasi karena adanya kebijakan pemblokiran.

F.2. PENGUNGKAPAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Capaian rincian output (RO) yang di-tagging sebagai Prioritas Nasional dapat diungkapkan pada Catatan Lainnya sebagaimana contoh di bawah ini dan data capaian RO secara lengkap disampaikan dalam lampiran LKKL.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagaimana pada Lampiran 1.

Terdapat satu kegiatan pada program PN yaitu Pengelolaan Data dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp9.666.497.000,00 yang terdiri 3 Klasifikasi Rincian Output dan 3 Rincian Output.

Program / Kegiatan Prioritas	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output
02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Data dan Informasi Publik	Layanan Data Kelautan dan Perikanan
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sarana Data Citra Satelit Radar
	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	OM Sarana Data Citra Satelit Radar

Realisasi Anggaran Prioritas Nasional BPISDKP TA 2025 senilai Rp5.780.853.774,00 atau 59,8% dari target Rp9.666.497.000,00. Dari pagu anggaran Rp9.666.497.000,00 terdapat blokir anggaran senilai Rp3.636.360.000,00.

Program Nasional	Program Prioritas	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
Memantapkan Sistem Pertahanan keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa melalui Swasembada pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Data dan informasi Publik sebanyak 245 layanan dokumen Publikasi, wilayah, peta, data Lokasi	4.600.000.000	2.323.700.522	50,5	2.275.600.000
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 6 unit	606.731.000	0	0	606.731.000
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 unit	4.459.766.000	3.457.153.252	77,5	954.029.000

Secara rinci, capaian output dan realisasi anggaran sebagaimana pada lampiran 2.

F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada tanggal 8 Mei 2025 terjadi pergantian pejabat

struktural di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sehingga terjadi perubahan pada pejabat pengelola keuangan. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 65/KPA/BPISDKP/KU.110/VI/2025 Tentang Perubahan Pertama atas Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Penerima PNBPN, dan Anggota Pengelola PNBPN pada tanggal 4 Juni 2025, susunan pengelola keuangan BPISDKP adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kuasa Pengguna Anggaran	Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.Si
	Pejabat Pembuat Komitmen	Ridla Kumara Hadi, S.Kom., M.Eng
	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM	Made Agus Dwipayana, S.E
	Bendahara Pengeluaran	Kadek Ratna Pratiwi, A.Md
	Staf Pengelola Keuangan	Endah Mulyastuti, S.E
	Staf Pengelola Keuangan	Il Rahma Pradira Gesari, S.T
	Staf Pengelola Keuangan	Todhi Pristianto, S.T.
	Staf Pengelola Keuangan	Prima Dini Indria, S.Si
	Bendahara PNBPN	I Nyoman Suastawan, S.E
	Staf Pengelola PNBPN	Eko Susilo, S.Pi

2. Merujuk pada lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang tindak lanjut efisiensi belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 2,1 triliun. Efisiensi anggaran tersebut menyasar pada sejumlah program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk kegiatan layanan data kelautan dan perikanan di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Penandatanganan kontrak kegiatan “Pengadaan Data Citra Satelit Radar dan Pemeliharaan Operasional

Stasiun Bumi” dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kontrak tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 September hingga 22 Desember 2025. Jenis pengadaan bersifat gabungan antara Lumsom dan Harga Satuan, dengan mekanisme pembayaran dua termin berdasarkan pencapaian output pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak.

Penutupan kontrak dan serah terima pekerjaan “Pengadaan Data Citra Satelit Radar dan Pemeliharaan Operasional Stasiun Bumi” dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan tiga (3) dokumen, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin Kedua yang ditandatangani oleh PPK dengan Project Manager e-GEOS SpA.
2. Berita Acara Pembayaran Termin Kedua yang ditandatangani oleh PPK BPISDKP dengan Chief Operating Officer (COO) e-GEOS S.p.A.
3. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK BPISDKP dengan Chief Operating Officer (COO) e-GEOS S.p.A.

Berdasarkan dokumen tersebut, e-GEOS telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Data Citra Satelit Radar dan Pemeliharaan Operasional Stasiun Bumi tersebut dengan kondisi lengkap, terpenuhi secara kuantitas, dan sesuai dengan persyaratan teknis dalam surat perjanjian/kontrak.

3. Terdapat blokir pada anggaran yang menjadi Prioritas Nasional sebesar Rp3.836.360.000,00. Pemblokiran tersebut menyebabkan realisasi penyerapan anggaran pada TA. 2025 rendah sebesar 77,07%.
4. Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal

Perbendaharaan nomor S-7/PB/PB.6/2025 perihal Penyerahan Pemutakhiran Akun Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Dinas/Negara, penerimaan yang semula dicatat pada akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dirubah menjadi 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.

5. Terdapat Pendapatan berupa Penerimaan Kembali belanja modal Tahun Anggaran yang lalu senilai Rp788.914.173,00 berupa penihilan RPATA Tahun 2024 (proses di awal tahun 2025) yaitu berupa pengembalian pajak atas belanja barang pembebasan bea masuk berdasarkan KMK Nomor 2997/KM.4/KPU.3/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Perubahan atas KMK Nomor 2608/KM.4/KPU.3/2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum kepada BPISDKP untuk kontrak pekerjaan penggantian sistem radar terminal, pengadaan citra satelit radar dan maintenance system antena penerima data yang terealisasi senilai Rp13.519.705.827,00 dari kontrak senilai Rp14.590.000.000,00. Sisa anggaran senilai Rp281.380.000,00 tidak direalisasikan dikarenakan termasuk sisa pembayaran Termin I 2024.

Lampiran1 Capaian Rincian Output TA.2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres
1	WA Program Dukungan Manajemen	2328 Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	231.415.000	0	228.633.464	1	1	100%
2	WA Program Dukungan Manajemen	2328 Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	7.092.114.000	0	7.083.620.547	2	2	100%
3	WA Program Dukungan Manajemen	2329 Pengelolaan Data dan Informasi	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	001 Layanan Data Kelautan dan Perikanan (Data)	4.600.000.000	2.275.600.000	2.323.700.522	245	78*	32%
4	WA Program Dukungan Manajemen	2329 Pengelolaan Data dan Informasi	RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	002 Sarana Data Citra Satelit Radar (Unit)	606.731.000	606.731.000	0	6	0	0%
5	WA Program Dukungan Manajemen	2329 Pengelolaan Data dan Informasi	RCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 OM Sarana Data Citra Satelit Radar (Unit)	4.459.766.000	954.029.000	3.457.153.252	3	3	100%

Lampiran2 Capaian Program Prioritas Nasional

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%	Keterangan
Prioritas Nasional 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4.600.000.000	2.323.700.522	50,52	Data	245	78	31,8	Pemblokiran sebesar Rp2.275.600.000 dari nilai Pagu, karena kebijakan efisiensi berdasarkan Perpres nomor 1 tahun 2025. keluaran kegiatan sesuai kontrak adalah 78 data citra dari pagu setelah blokir
	606.731.000	-	-	Unit	6	0	0	<i>Pemblokiran Rp606.731.000, dari nilai Pagu, karena efisiensi berdasarkan Perpres nomor 1 tahun 2025</i>
	4.459.766.000	3.457.153.252	77,52	Unit	3	3	100	<i>Pemblokiran sebesar Rp954.029.000 dari nilai pagu, karena kebijakan efisiensi berdasarkan Perpres nomor 1 tahun 2025</i>